

**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN
UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Terdapat Pada *Indonesia
Governance Indexs* Tahun 2014)**

Vegy Gustianra¹, Vanica Serly²

¹Alumni Jurusan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: egy.anra@gmail.com

Abstract: *The variables tested in the study consist of Good Government Governance measured by the rank of Indonesia Governance Index (IGI) and the size of the legislative by using the number of members of the districts parliament, and also local government performance measured by three proxies, the GDP per capita, Poverty Rates, Independence Ratios, Economic Growth and unemployment rate. The study is conducted in 33 district in Indonesia on 2014. The results show that two is no significant effect of good government governance on local government performance by proxy of Independence Ratios and Economic Growth. One is no significant effect on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of economic growth. one is significant impact on the size of the legislative on the performance of local government by proxy of Independence Ratios and three model of studi good government governance and the size of the legislative on the performance of local government by proxy of GDP per capita, Poverty Rates, unemployment rate.*

Keywords: *Governance; Legislature; Local Government Performance;*

How to cite (APA 6th style)

Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Terdapat pada *Indonesia Governance Indexs* Tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri E, 1426-1442.

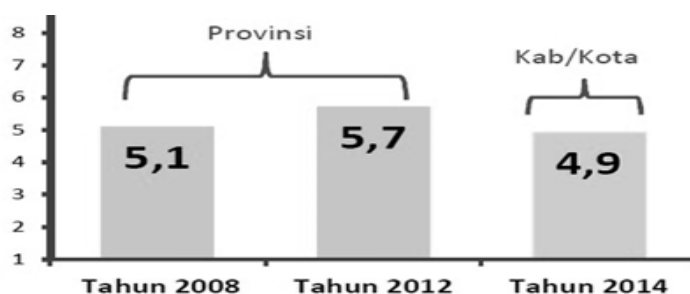
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah jalan penerapan otonomi daerah di Indonesia dan direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri (secara mandiri) urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola kebutuhan masyarakat (desentralisasi fiskal). Masyarakat sebagai prinsipal menginginkan pemerintahan mereka dikelola dengan baik, sehingga kecurangan yang akan merugikan banyak pihak tidak terjadi. Pemerintah bertindak seperti agen berupaya mengelola pemerintah dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah tersebut akan

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan kepada legislatif, wakil dari prinsipal (masyarakat daerah).

Kinerja pemerintah daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bastian (2006) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu perkiraan pencapaian pelaksanaan dalam mewujudkan visi misi organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menunjukkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (organisasi). Mahsun (2006) mengatakan tanpa tujuan atau target, pemerintah daerah tidak dapat mengetahui keberhasilan karena tidak adanya tolak ukur kinerja tersebut. Kinerja pemerintah daerah dapat ditinjau dengan menggunakan proksi (indikator) seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran (Mahsun, 2006). Adhianthoko (2013) menyebutkan indikator pengukuran kinerja pemerintah juga dapat dilihat dengan rasio kemandirian keuangan pemerintah.

Prinsip *good governance* diterapkan dengan baik pada pemerintah daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik (Bambang dan Handi, 2016). *World Bank* dalam Mardiasmo (2009) menyebutkan tata kelola (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen solid dan bertanggung jawab. Tata kelola menjadi kunci dalam pengelolaan pemerintah sehingga tujuan dari pemerintah tercapai dengan efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi landasan pelaksanaan pemerintah daerah yang baik, hal ini dapat dilihat pada pasal 67 yang berbunyi “pemerintah daerah berkewajiban menerapkan prinsip dari tata pemerintahan yang baik dan bersih”. Hasil dari *Indonesia Governance Indeks* 2014 (Grafik.1) di 34 kabupaten/kota yang dipilih menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia tergolong buruk (rata-rata seluruh kabupaten kota adalah 4,92 dari skala 1–10).



Gambar 1. Perbandingan Rata-Rata Provinsi dan Kabupaten Kota

(Sumber: *Indonesia Governance Indeks*)

Dewan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga berdampak terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa DPRD mempunyai tugas dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak pada peningkatan kinerja daerah. Sesotyangningtyas (2012) menemukan bahwa ukuran anggota legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Media (2012) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan legislatif maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan pemerintah daerah dalam bekerja, sedangkan semakin tinggi tanggung jawab dalam bekerja maka akan mempengaruhi hasil kinerja.

Tata kelola pemerintahan dan ukuran legislatif memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Handi (2016) menemukan bahwa prinsip *good governance* (tata kelola) memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah namun tidak signifikan. Febrina dan Aristanti (2017) menemukan bahwa *good governance* dan ukuran legislatif mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintahan provinsi se-Indonesia. Penelitian merujuk dari penelitian yang dilakukan Febrina dan Aristanti (2017), sampel pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia, data IGI terbaru yaitu tahun 2014 dan menggunakan data PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, rasio kemandirian, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di tahun 2014.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Lupia dan McCubbins (2000) mengemukakan bahwa yang menjadi prinsipal adalah warga negara dan menunjuk perwakilannya untuk melayani mereka sebagai agennya. Lane (2000) berpendapat bahwa teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik di negara demokrasi, hal senada juga dikemukakan oleh Terry (1984) yang menjelaskan bahwa konsep ekonomi organisasi sektor publik menggunakan teori keagenan. Praktek kinerja organisasi sektor publik merupakan konsep dari teori keagenan. Pemerintah sebagai agen juga harus mempunyai tata kelola yang baik (*good governance*) agar dapat meminimalisir kecurangan, dalam arti sempit *good governance* dapat berfungsi untuk menekan dan mengendalikan. Masyarakat sebagai prinsipal juga memilih perwakilannya dalam bentuk dewan legislatif (DPRD) untuk mengawasi dari kinerja pemerintah tersebut.

***Good Government Governance* (tata kelola pemerintah yang baik)**

Indonesia Governance Indeks (IGI) 2012, mengartikan tata kelola pemerintah yang baik sebagai suatu proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (bisnis). UNDP (1997) dalam mardiasmo (2009) menjabarkan prinsip-prinsip *good government governance* yang harus dimiliki dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan meliputi: *Participation, Rule of Law (Kerangka Hukum), Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency and effectiveness, Accountability, Strategic Vision*.

Indonesia Governance Index

Indonesia Governance index (IGI) awalnya bernama *Partnership Governance Indeks 2008 (PGI 2008)* sebagai pilot untuk menguji suatu pengukuran tunggal yang menilai kinerja tata kelola pemerintah. IGI memberikan artian yang spesifik yaitu merupakan suatu alat untuk mengukur tata kelola pemerintahan di daerah Indonesia, khususnya terhadap empat arena tata kelola yaitu: pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang mencakup entitas bisnis. Tujuan dari IGI adalah menghasilkan indeks yang dapat digunakan untuk menjadi alat advokasi dalam mempromosikan praktek-praktek *good government governance* ditingkat provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia.

Ukuran Legislatif

Ukuran legislatif dilihat dengan seberapa banyak anggota legislatif di suatu daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mengungkapkan bahwa semakin besar jumlah anggota legislatif dapat

memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Giligan dan Matsusaka (2001) menyebutkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kebijak fiskal (belanja negara bagian dan lokal pendapatan). Styaningrum dan Syafitri (2012) mengkaitkan ukuran legislatif dengan pengungkapan laporan keuangan dan hasilnya berpengaruh signifikan. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan DPRD kabupaten/kota menjadi alat ukur dari variabel ukuran legislatif, karena dengan jumlah yang maksimal membuat pengawasan kepada pemerintah daerah juga mejadi maksimal.

Kinerja Pemerintahan

Kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atas pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Benardin dan Russel (1993) didalam Ahcmad (2002) memberikan pengertian kinerja yaitu pencapaian dari hasil fungsi kegiatan atau pekerjaan tertentu dalam periode tertentu. Manfaat pengukuran kinerja suatu pemerintahan yaitu: membuat mutu dari pengambilan keputusan semakin baik, meningkatkan akuntabilitas internal, meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Indikator Pengukuran Kinerja

Mahsun (2006) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan, hal ini terkait dengan tujuan oeganisasi publik. Adapun indikator dari kinerja pemerintah sebagai berikut:

PDRB perkapita adalah Badan Pusat Statistik (2009) menyebutkan bahwa tujuan dari PDRB adalah melihat besaran pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan yang diterima ini menjadi dasar ukuran kemakmuran suatu wilayah, karena dengan adanya pendapatan masyarakat dapat membiayai kehidupannya. Pendapatan tercipta karena adanya proses produksi didaerah tersebut.

Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya sendiri (Adhiantoko, 2013). Tingginya rasio mengartikan bahwa semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern dan pemerintah pusat. Febrina dan Aristanti (2017) menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat kemandirian menunjukkan kinerja buruk bagi pemerintah daerah dan semakin tinggi tingkat kemandirian menunjukkan kinerja baik bagi pemerintah daerah. Indikator ini dapat diformulasikan dalam rumus:

$$Rasio\ kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Dana\ perimbangan} \times 100\ %$$

Sumber: Febrina dan Aristanti 2017

Tingkat kemiskinan adalah pengukuran ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan atau non makanan. Febrian dan Aristanti (2017) menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kepentingan untuk mengurangi kemiskinan di daerahnya, karena kemiskinan adalah masalah utama dalam mencapai kemakmuran masyarakat diwilayah itu.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu parameter yang diturunkan dari perhitungan PDRB, dimana PDRB tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini berguna untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah, yang mana peningkatan pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dari pemerintah daerah.

Tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran adalah tingkat masyarakat yang tidak bekerja atau masyarakat yang mempersiapkan usaha atau masyarakat yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan (Kuncoro, 2015).

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah agen penyelenggara pemerintah, pelayanan kepada masyarakat merupakan cerminan dalam membangun dan mengelola roda perekonomian daerah. Kinerja menjadi alat ukur penilaian untuk mengetahui perkembangan pemerintah kabupaten dan kota. Faktor yang mendukung kinerja pemerintah daerah adalah tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga tercapainya kinerja pemerintah yang baik dan tidak merugikan para pemangku kepentingan. Indikator yang digunakan adalah PDRB, rasio kemandirian tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

H1: *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi PDRB.

H2: *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi tingkat kemiskinan.

H3: *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian.

H4: *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi.

H5: *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupate/kota dengan proksi tingkat pengangguran.

Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran legislatif merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan pemerintah. Ukuran legislatif di ukur dengan seberapa besar jumlah anggota DPRD yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Besarnya ukuran legislatif dapat mempercepat program kerja yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya oleh pemerintah. Indikator yang digunakan adalah PDRB, rasio kemandirian tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

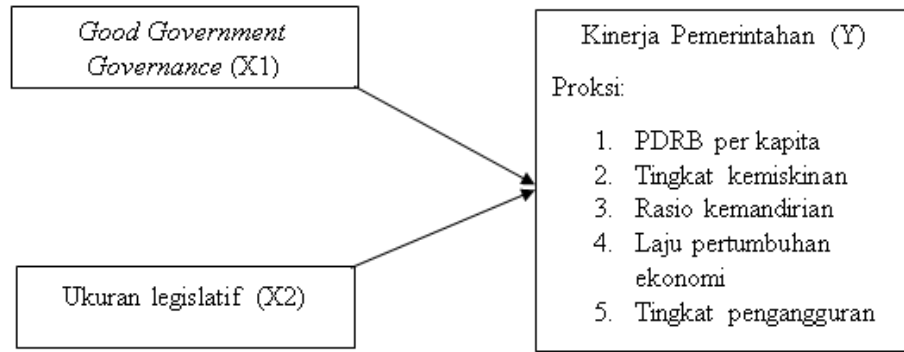
H6: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi PDRB.

H7: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi tingkat kemiskinan.

H8: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian.

H9: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi.

H10: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi tingkat pengangguran.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk riset asosiatif, yang bertujuan melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berasal dari angka atau penelitian kualitatif yang di angkakan (Sugiyono, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-indonesia yang berjumlah 415 (empat ratus lima belas) kabupaten/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Sampel dari penelitian ini adalah 33 kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat pada *Indonesia Governance indeks* dengan menggunakan *total sampling*. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

VARIABEL PENELITIAN & PENGUKURANNYA

Kinerja Pemerintah

Kinerja Pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil atas pencapaian kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Penelitian ini menggunakan lima pandangan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang datanya didapatkan pada situs bps.go.id sedangkan rasio kemandirian didapatkan dengan Laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pusat melalui prosedur permintaan data melalui www.bpk.go.id. Pengukuran tersebut menggunakan skala rasio.

Good Government Governance

Good government governance (tata kelola pemerintah yang baik) menurut *World Bank* didalam Mardiasmo (2009) adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Data dari variabel ini didapatkan pada situs kemitraan.or.id/igi yang mana pengukurannya menggunakan skala rasio.

Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau anggota legislatif bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dapat didayagunakan dengan baik dan benar. Data dari variabel ini diperoleh dengan prosedur permintaan data pada situs kemendagri.go.id yang mana pengukurannya menggunakan skala rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GGG	33	3.93	6.85	4.9167	.69337
Ukuran Legislatif	33	25.00	50.00	37.1212	7.90869
PDRB per kapita	33	11163.00	118366.00	41421.5152	26367.79246
Tingkat Kemiskinan	33	1.68	34.27	10.9448	8.00873
Rasio Kemandirian	33	.04	1.24	.2067	.23700
Pertumbuhan ekonomi	33	-.97	11.27	5.6327	2.46169
Tingkat Pengangguran	33	1.03	13.83	5.4524	3.44721
Valid N (listwise)	33				

Statistik Deskriptif

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil dari Tabel 1 menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel GGG (X1) memiliki rata-rata (*mean*) 4.9167. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks *good government governance* pemerintah daerah kabupaten/kota dikatakan sedang karena diantara nilai 4,86 hingga nilai 6,14. Selain itu, dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi variabel GGG adalah 6.85, nilai terendah adalah 3,93 dan standar deviasi sebesar 0,69. Variabel Legislatif (X2) memiliki rata-rata sebesar 37 orang. Nilai tertinggi sebesar 50 dan nilai terendah sebesar 25. Standar deviasi variabel legislatif adalah sebesar 7,91.

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jumlah anggota DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2014. Selanjutnya variabel PDRB (Y1) memiliki rata-rata sebesar 41421.52, yang berarti selama tahun 2014 rata-rata PDRB per kapita pemerintah daerah di Indonesia sebesar 41421.52. Nilai tertinggi sebesar 118366.00, nilai terendah sebesar 11163.00 dan standar deviasi sebesar 26367.79. Variabel tingkat kemiskinan (Y2) memiliki nilai rata-rata sebesar 10,94, nilai terendahnya sebesar 1,68 dan nilai tertinggi adalah 34.27 selain itu standar deviasi variabel tingkat kemiskinan sebesar 8,00.

Variabel Rasio Kemandirian (Y3) memiliki nilai tertinggi sebesar 0,04 dan nilai terendah sebesar 1,24, selain itu nilai rata-rata dari variabel ini sebesar 0,21 yang artinya pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia dapat mandiri dalam membiayai kegiatannya sebesar 21%. Variabel Pertumbuhan ekonomi (Y4) mempunyai rata-rata sebesar 5,63 yang berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten kota mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar nilai tersebut. Nilai tertinggi dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah 11,27 dan nilai terendah sebesar -0.97, serta memiliki standar deviasi sebesar 2,46. Variabel tingkat pengangguran (Y5) memiliki nilai tertinggi sebesar 13,83 dan nilai terendah sebesar 1.03, selain itu rata-rata dari variabel ini sebesar 5,45 yang artinya tingkat pengangguran dari pemerintah kabupaten kota di Indonesia sebesar nilai tersebut. Standar deviasi dari variabel tingkat pengangguran adalah 3,45.

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) dari Y3

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.523 ^a	.273	.225	.20865

a. Predictors: (Constant), Legislatif, GGG

b. Dependent Variable: rasio kemandirian

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel di atas didapat nilai *Adjusted R²* sebesar 0,225,. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel ukuran GGG (X1), Ukuran Legislatif (X2) terhadap Kinerja Pemerintah yaitu Rasio Kemandirian(Y3) sebesar 22,5%. Berarti 22,5% faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif. Sedangkan sisanya 77,5% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) dari Y4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.300 ^a	.090	.029	2.42557

a. Predictors: (Constant), Legislatif, GGG

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel di atas didapat nilai *Adjusted R²* sebesar 0,029,. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel ukuran GGG (X1), Ukuran Legislatif (X2) terhadap Kinerja Pemerintah yaitu Pertumbuhan Ekonomi(Y3) sebesar 2,9%. Berarti 2,9% faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah dapat dijelaskan oleh *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif. Sedangkan sisanya 98,1% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Namun hal berbeda terjadi pada Y1, Y2, Y5 hasil dari *Adjusted R Square* bernilai negatif oleh karena itu model dari penelitian pada variabel Y1, Y2, Y5 tidak dapat dilanjutkan.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) dari Y3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.617	.298		-2.070	.047		
1 x1	.062	.054	.182	1.158	.256	.981	1.019
x2	.014	.005	.466	2.966	.006	.981	1.019

a. Dependent Variable: y3

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2019*

Hasil pengujian dengan program SPSS seperti yang terlihat pada Tabel 4.8.1 yaitu pada variabel *good government governance* (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,158 < 1,69 = t_{tabel}$ dan $sig = 0,256 > 0,05\%$ jadi H_0 diterima. Ini berarti variabel *good government governance* secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel rasio kemandirian(Y3). Pada variabel ukuran legislatif (X2) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,966$ dengan nilai $sig = 0,006 < 0,05$ jadi H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti variabel ukuran legislatif secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel rasio kemandirian(Y3).

Tabel 6
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) dari Y4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.402	3.468		3.288	.003		
x1	-.990	.624	-.279	-1.586	.123	.981	1.019
x2	-.024	.055	-.078	-.443	.661	.981	1.019

Untuk uji statistik T pada variabel Y4 dapat dilihat dari tabel 4.8.2 bahwa pada variabel *good government governance* (X1) diperoleh nilai $t_{hitung} = -1,586 < 1,69 = t_{tabel}$ dan $sig = 0,123 > 0,05\%$ jadi H_0 diterima. Ini berarti variabel *good government governance* secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi(Y4). Pada variabel ukuran legislatif (X2) diperoleh nilai $t_{hitung} = -0,443 < 1,69$, dengan nilai $sig = 0,661 > 0,05$ jadi H_0

diterima dan H_a ditolak, ini berarti variabel ukuran legislatif secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y4).

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji statistik F Y3
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.491	2	.246	5.642	.008 ^b
	Residual	1.306	30	.044		
	Total	1.797	32			

a. Dependent Variable: y3

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari tabel di atas terlihat nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,008 yang mana $\leq 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *good government governance* dan ukuran legislatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu rasio kemandirian. Untuk pengujian statistik F pada variabel pertumbuhan ekonomi (Y4) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji statistik F Y4
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.415	2	8.707	1.480	.244 ^b
	Residual	176.502	30	5.883		
	Total	193.917	32			

a. Dependent Variable: y4

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari tabel di atas terlihat nilai sig. yang diperoleh sebesar 0,244 yang mana $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *good government governance* dan ukuran legislatif secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 9
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandarized Residual	Unstandarized Residual	Unstandarized Residual	Unstandarized Residual	Unstandarized Residual
N		33	33	33	33	33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7	0E-7	0E-7	0E-7	0E-7
	Std. Deviation	26084.7599	7.76659671	.20202912	2.34855171	3.42030045
	Absolute	.192	.151	.204	.162	.130
Most Extreme Differences	Positive	.192	.151	.204	.082	.130
	Negative	-.116	-.118	-.142	-.162	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.105	.865	1.174	.929	.750
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174	.442	.127	.354	.628

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas didapatkan bahwa nilai *asympt Sig (2-tailed)* adalah 0,169 yang mana $> \alpha=0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi yang digunakan baik, sehingga penelitian layak untuk dilanjutkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 10
Uji Multikolinearitas Y3
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.617	.298		2.070	.047		
	x1	.062	.054	.182	1.158	.256	.981	1.019
	x2	.014	.005	.466	2.966	.006	.981	1.019

a. Dependent Variable: y3

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 11
Uji Multikolinearitas Y4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.402	3.468		3.288	.003	
	x1	-.990	.624	-.279	1.586	.123	.981
	x2	-.024	.055	-.078	-.443	.661	.981

a. Dependent Variable: y4

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari Tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 12
Uji Heterokedastisitas Y3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.641	.508		-1.260	.217
	LOG_x1	.493	.462	.188	1.069	.294
	LOG_x2	.327	.286	.201	1.142	.262

a. Dependent Variable: ABRESID_LOGY3

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 13
Uji Heterokedastisitas Y4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.006	2.450		.819	.419
	x1	-.407	.441	-.165	-.923	.363
	x2	.043	.039	.197	1.102	.279

a. Dependent Variable: ABRESID_Y4

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.4.1 hingga tabel 4.4.5 diketahui bahwa nilai signifikansi atau *Sig.* variabel GGG (X1) dan variabel Ukuran Legislatif (X2), lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

Uji Autokorelasi

Tabel 14
Uji Autokorelasi Y3
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 ^a	.273	.225	.20865	2.215

a. Predictors: (Constant), Legislatif, GGG

b. Dependent Variable: rasio kemandirian

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel 15
Uji Autokorelasi Y4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.300 ^a	.090	.029	2.42557	1.880

a. Predictors: (Constant), Legislatif, GGG

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Menurut Imam Ghazali (2013), tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara du sampai dengan (4-du). Nilai du dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan $k=2$, $N=33$ dengan signifikansi $\alpha=0,05$. Didapat nilai $du(\text{tabel})=1,5770 < \text{Durbin-Watson}(\text{hitung}) = 2,266 < \text{nilai } (4-du)=2,423$. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi dan uji regresi linear berganda dapat dilanjutkan.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 16
Regresi Linear Berganda Y3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.617	.298		-2.070	.047		
x1	.062	.054	.182	1.158	.256	.981	1.019
x2	.014	.005	.466	2.966	.006	.981	1.019

a. Dependent Variable: y3

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda untuk Y3 pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{KEMANDIRIAN} = -0,617 + 0,062 X_1 + 0,014 X_2.$$

Hasil perhitungan regresi linear berganda untuk variabel pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 17
Regresi Linear Berganda Y4
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.402	3.468		3.288	.003		
x1	-.990	.624	-.279	-1.586	.123	.981	1.019
x2	-.024	.055	-.078	-.443	.661	.981	1.019

a. Dependent Variable: y4

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi linear berganda untuk Y4 pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{PERTUMBUHAN} = 11,402 - 0,990 X_1 - 0,024 X_2.$$

PEMBAHASAN

Pengaruh *good government governance* terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi rasio kemandirian

Rumusan hipotesis tiga dalam penelitian ini adalah *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji statistik T bahwa hipotesis tiga ini ditolak yang artinya *good government governance* tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil uji analisis regresi berganda dimana nilai sig. $0,256 > 0,05$.

Good government governace memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan daerah. Namun dalam implementasinya, masih ada beberapa prinsip-prinsip yang masih belum bisa diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga berdampak pada kurangnya kinerja pemerintahan daerah, seperti contoh beberapa daerah yang masih belum melakukan transparansi terhadap hasil kinerja pemerintahannya.

Pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi

Rumusan hipotesis empat dalam penelitian ini adalah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji statistik T bahwa hipotesis empat ini ditolak yang berarti *good government governanc* terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan regresi linear berganda diperoleh nilai sig. $0,123 > 0,05$.

Peningkatan pertumbuhan didukung oleh pemerintahan yang bersih karena hanya *good governance* yang dapat mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah mengakibatkan setiap daerah memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangga daerahnya, sehingga kebijakan-kebijakan antara suatu daerah dengan daerah lain berbeda seperti dalam menerapkan *good government governance*. Hal ini juga berlaku pada kebijakan-kebijakan fiskal sehingga secara langsung berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal inilah yang menyebabkan *good government governance* tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya penerapan yang merata di setiap daerah.

Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi rasio kemandirian

Rumusan hipotesis delapan dalam penelitian ini adalah Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian. Berdasarkan hasil uji statistik T bahwa hipotesis tujuh ini diterima yang artinya ukuran legislatif terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian. Berdasarkan hasil pengolahan regresi linear berganda diperoleh nilai sig. $0,006 < 0,05$.

Yulianingtyas (2011) mengungkapkan bahwa semakin besar jumlah anggota legislatif dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah. Giligan dan Matsusaka (2001) menyebutkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kebijak fiskal (belanja negara bagian dan lokal pendapatan). Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya sendiri. Tingginya rasio mengartikan bahwa semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern dan pemerintah pusat. Kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh legislatif pada penganggaran dan realisasi terhadap belanja dan pendapatan daerah menyebabkan pemerintahan daerah mengalokasikan dan mengelola dana sesuai dengan yang dianggarkan. Semakin baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah maka semakin meningkatnya kemandirian suatu daerah yang dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan.

Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi

Rumusan hipotesis sembilan dalam penelitian ini adalah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil uji parsial atau uji T bahwa hipotesis sembilan ini ditolak yang berarti ukuran legislatif tidak terbukti berpengaruh terhadap pemerintah daerah dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan regresi linear berganda diperoleh nilai sig. $0,661 > 0,05$.

Hal ini sesuai dengan penelitian Sesotyaningtyas (2012) yang menjelaskan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan karena banyaknya anggota legislatif tidak menjamin kualitas sumber daya manusia dari anggota legislatif tersebut.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai *Good Government Governance*, Ukuran Legislatif terhadap Kinerja pemerintahan kabupaten/kota selama tahun 2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hipotesis satu, dua, lima, enam, tujuh dan sepuluh tidak dapat dilanjutkan karena model regresi dari penelitian ini terolak atau nilai *Adjusted R Square* dari penelitian ini bernilai negatif. Hipotesis tiga dalam penelitian ini ditolak atau *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian. Hipotesis empat penelitian ini ditolak atau *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi. Hipotesis delapan dalam penelitian ini diterima atau Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi rasio kemandirian. Hipotesis sembilan dalam penelitian ini ditolak atau ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proksi laju pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang terdapat pada Indonesia Governance indeks. Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin akan berbeda jika dilakukan pada kabupaten/kota seluruh Indonesia, mengingat masih banyaknya kabupaten/kota di wilayah di Indonesia. Penelitian ini hanya dilakukan dengan data tahun 2014, hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin berbeda dengan tahun yang terbaru.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1) Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerapan *good government governance* (GGG) dan pengawasan oleh dewan legislatif untuk menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. 2) Diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi Kinerja pemerintah seperti *leverage*. 3) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data yang digunakan maupun waktu dari penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dana dan Aset Daerah Kabupaten Blora tahun 2007-2011). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

- Bambang Jatmiko. Handi Y, L. 2016. Good Governance Government and Effect on Local Government Performance (Survey on Gunung Kidul District Government Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research (IJABER)*. Vol 14, No14, 2016, 981-997.
- Bank Indonesia. 2015. *Meta Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Bank Indonesia: Devisi Statistik Data Sekunder: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Pedoman Praktis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto: Tata Cara Menghitung Menurut Penggunaan*. Katalog: 1303025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor publik: Suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Claraini, Chici. 2017. Pengaruh Good Governance, Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD kabupaten rokan hilir). *JOM Fekon* Vol.4 No.1.
- Febrina L, Hutapea. Aristanti Widyaningsih. 2017. Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. 9 (1), 2017, 173-186.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hamid, Abdul. Yunus, Mukhlis. Sulaiman. 2015. Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bireuen. *Jurnal Manajemen* Vol.4 No.4, 112-121.
- Hartono, Rudi. Busari, Arfiah. Awluddin, Muhammad. 2018. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Inovasi: Jurnal FEB Universitas Mulawarman* Vol.14 (1) 36-43.
- Indonesia Governance Indexs. 2012. www.kemitraan.or.id/igi/. Online. Diakses: 15 Februari 2019.
- Indonesian Governance Indexs. 2014. *Menata Indonesia Dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Indeks 2014*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martani. Dwi, Hilda Rossieta, Ratna Wardani (2017). Good Governance and the Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. *International Journal Public Sector Performance Management* Vol.3 No.1.
- Media Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1 (1).
- Terry M. Moe. 1984. The New Economics of Organizations. *American Journal of Political Science*. Vol 28, No. 4: 739-777.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- www.bps.go.id
- www.kemendagri.go.id